

INTERVENSI DINAS SOSIAL TERHADAP PENGEMIS ANAK DI BAUBAU: TEKATAN KELUARGA DAN ORIENTASI EKONOMI ANAK

Irfan M^{1*}, Mahyudin², Muh. Askal Basir³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau 93724, Indonesia

Corresponding Author: irfanm202344@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel: (Diisi Editor)</i> Diterima: 18 Maret 2026 Direvisi: 28 Maret 2026 Disetujui: 29 Juni 2026 Tersedia Daring: 14 Juli 2026 Kata Kunci: Dinas Sosial; Intervensi Sosial; Orientasi Ekonomi Anak; Pengemis Anak; Perlindungan Anak	Fenomena pengemis anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan kemiskinan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi Dinas Sosial dalam penanganan pengemis anak di Kota Baubau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan aktivitas mengemis pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Sosial Kota Baubau, orang tua anak pengemis, dan anak yang melakukan aktivitas mengemis. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Baubau telah melakukan berbagai bentuk intervensi melalui penjangkauan, pendataan, rehabilitasi sosial, edukasi keluarga, dan pemberian bantuan sosial. Namun demikian, fenomena pengemis anak masih terus berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan aktivitas mengemis tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga, tetapi juga oleh orientasi ekonomi yang terbentuk pada diri anak setelah memperoleh pendapatan secara langsung dari aktivitas mengemis. Pengalaman memperoleh uang secara mandiri mendorong anak memandang aktivitas mengemis sebagai cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak kembali melakukan aktivitas mengemis meskipun telah memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas intervensi sosial dalam penanganan pengemis anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada perubahan perilaku anak, penguatan fungsi keluarga, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Keywords:	ABSTRACT
Child Beggars; Child Protection; Children's Economic; Orientation; Social Intervention; Social Service Agency	<i>Child begging remains a social problem that requires serious attention from local governments because it is closely related to social welfare, child protection, and family poverty issues. This study aims to analyze the Social Service Agency's intervention in addressing child beggars in Baubau City and to identify the factors influencing the persistence of begging activities among children. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving officials of the Baubau Social Service Agency, parents of child beggars, and children engaged in begging activities. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Baubau Social Service Agency has implemented various interventions, including outreach, data collection, social rehabilitation, family education, and social assistance programs. However, child begging continues to occur.</i>

The study found that the persistence of begging activities is influenced not only by family economic pressures but also by the economic orientation developed by children after experiencing direct income generation through begging. The experience of earning money independently encourages children to perceive begging as an effective means of fulfilling their personal needs. As a result, some children return to begging activities despite having received rehabilitation and social assistance. This study concludes that effective intervention for child beggars requires not only social assistance programs but also behavioral transformation, family strengthening, and sustainable family economic empowerment.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, serta negara. Dalam perspektif pembangunan manusia, anak tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai generasi penerus yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Hoang et al., 2024). Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang aman, menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan secara berkelanjutan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak anak yang hidup dalam kondisi rentan dan terlibat dalam aktivitas ekonomi jalanan, termasuk kegiatan mengemis di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan sosial yang belum sepenuhnya dapat diatasi oleh sistem perlindungan sosial yang ada.

Pada tingkat nasional, persoalan anak jalanan masih menjadi bagian dari masalah kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya selesai. Data Kementerian Sosial yang dikutip oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami penurunan dari 20.719 anak pada tahun 2016 menjadi 16.461 anak pada tahun 2017, lalu menurun menjadi sekitar 12.000 anak pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa anak jalanan masih menjadi kelompok rentan yang memerlukan perlindungan sosial secara berkelanjutan. Pada tingkat lokal, data Dinas Sosial Kota Baubau menunjukkan bahwa terdapat 52 pengemis anak dan anak terlantar yang tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan Betoambari tercatat memiliki jumlah tertinggi sebanyak 19 anak, disusul Kecamatan Batupoaro sebanyak 18 anak, sedangkan kecamatan lainnya memiliki jumlah yang lebih kecil (Dinas Sosial Kota Baubau, 2023a). Data ini memperlihatkan bahwa fenomena pengemis anak tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga hadir sebagai persoalan sosial nyata di Kota Baubau.

Fenomena pengemis anak merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang masih ditemukan di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia (Muda et al., 2022). Keberadaan anak-anak yang melakukan aktivitas meminta-minta di jalan raya, persimpangan lampu lalu lintas, kawasan pasar, maupun pusat keramaian lainnya mencerminkan adanya persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Aktivitas mengemis yang dilakukan oleh anak tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial, budaya, pendidikan, serta lemahnya perlindungan terhadap anak (Musofiana & Osman, 2025). Dalam banyak kasus,

anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, mengalami keterbatasan dalam proses tumbuh kembang, serta menghadapi berbagai risiko sosial yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

Fenomena anak yang hidup dan beraktivitas di jalanan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia (Nurwati et al., 2022). Meskipun berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, masih terdapat kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan akibat kemiskinan, keterlantaran, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis merupakan salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena berada pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan, serta pengabaian hak-hak dasar anak (Situmeang et al., 2025). Dalam perspektif perlindungan anak, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis menunjukkan belum optimalnya fungsi perlindungan sosial yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan hidup dalam lingkungan yang aman.

Secara nasional, pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai kebijakan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak terlantar dan anak yang berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial. Dalam implementasinya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan berbagai bentuk intervensi sosial yang mampu mencegah dan mengurangi keterlibatan anak dalam aktivitas jalanan.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak yang hanya berorientasi pada bantuan sosial belum selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas mengemis. Kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja orang tua, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap aktivitas mengemis sering kali menyebabkan fenomena tersebut terus berulang (Dinillah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan pengemis anak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pada perubahan perilaku dan penguatan kapasitas keluarga sebagai lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan merupakan konsekuensi dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak. Kemiskinan, pengangguran orang tua, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, serta terbatasnya akses terhadap layanan sosial sering menjadi faktor yang mendorong anak turun ke jalan untuk mencari penghasilan tambahan (Saghir, 2025). Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan anak dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks perlindungan anak, aktivitas mengemis yang dilakukan oleh anak merupakan bentuk kerentanan sosial yang memerlukan perhatian khusus (Drydakris, 2023). Anak yang berada di jalan memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan, eksploitasi, kecelakaan, serta berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya (Ohab & Shovo, 2026). Selain itu, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis juga dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka karena lingkungan jalanan

sering kali tidak memberikan ruang yang mendukung bagi proses pembentukan karakter dan pendidikan anak (Fantahun & Taa, 2022). Oleh karena itu, penanganan pengemis anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penertiban semata, tetapi harus disertai dengan intervensi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu kota berkembang di wilayah Kepulauan Buton, Kota Baubau menghadapi berbagai dinamika sosial yang turut memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Meskipun angka kemiskinan Kota Baubau mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pengemis anak masih dapat ditemukan pada sejumlah titik strategis seperti kawasan lampu merah, pasar tradisional, dan area pelabuhan. Keberadaan anak-anak yang melakukan aktivitas mengemis di ruang publik menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi (Husnan, 2026). Fenomena ini menjadi perhatian penting karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Data Dinas Sosial Kota Baubau menunjukkan bahwa terdapat 52 pengemis anak dan anak terlantar yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Baubau. Kecamatan Betoambari tercatat memiliki jumlah tertinggi sebanyak 19 anak, disusul Kecamatan Batupoaro sebanyak 18 anak. Sementara itu, Kecamatan Lea-Lea dan Wolio masing-masing memiliki 5 anak, Kecamatan Murhum sebanyak 3 anak, Kecamatan Sorawolio sebanyak 2 anak, sedangkan Kecamatan Bungi dan Kokalukuna tidak tercatat memiliki pengemis anak atau anak terlantar pada saat pendataan dilakukan (Dinas Sosial Kota Baubau, 2023a). Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena kerentanan anak masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi terlantar maupun terlibat dalam aktivitas mengemis (Kusumawati & Luluardi, 2023). Berbagai bentuk intervensi telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau, antara lain melalui kegiatan penjangkauan, pendataan, rehabilitasi sosial, edukasi kepada anak dan keluarga, serta pemberian bantuan sosial berupa sandang dan pangan. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pembinaan kepada orang tua agar dapat meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Intervensi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menangani fenomena pengemis anak secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai bentuk intervensi telah dilakukan, fenomena pengemis anak masih terus ditemukan di Kota Baubau. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Baubau, sebagian anak yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dan bantuan masih kembali melakukan aktivitas mengemis pada waktu berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengemis anak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang lebih kompleks. Situasi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi sosial terhadap anak jalanan dan pengemis anak umumnya dilakukan melalui penjangkauan, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, edukasi keluarga, perlindungan hukum, dan penguatan peran lembaga sosial. Namun, efektivitas intervensi tersebut sering kali belum optimal ketika hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa menyentuh akar persoalan keluarga dan perilaku anak. Dinillah et al. (2025) menjelaskan bahwa kemiskinan keluarga, rendahnya pendidikan, dan tekanan sosial perkotaan dapat mempertahankan praktik mengemis. Nnama-Okechukwu et al. (2023) juga menekankan pentingnya intervensi pekerjaan sosial

yang tidak hanya membantu anak, tetapi juga memperkuat keluarga dan lingkungan sosialnya. Sementara itu, Musofiana & Osman (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan perlu disertai dengan pendekatan sosial yang mampu mencegah anak kembali ke jalan.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat celah penelitian mengenai alasan mengapa anak tetap kembali mengemis meskipun telah menerima bantuan sosial dan rehabilitasi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan anak sebagai korban tekanan ekonomi keluarga, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana pengalaman memperoleh uang secara langsung dapat membentuk orientasi ekonomi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi orientasi ekonomi anak sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan aktivitas mengemis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pengemis anak dari sisi tekanan ekonomi keluarga, tetapi juga dari cara anak memaknai aktivitas mengemis sebagai sumber pendapatan yang dianggap mudah dan langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi Dinas Sosial dalam penanganan pengemis anak di Kota Baubau dengan menelaah keterkaitan antara tekanan ekonomi keluarga, orientasi ekonomi anak, serta berbagai bentuk intervensi sosial yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan sosial dan perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan pengemis anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengemis anak dan intervensi Dinas Sosial dalam penanganannya di Kota Baubau. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis dan berbagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Nnama-Okechukwu et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas sosial berdasarkan perspektif para informan yang terlibat secara langsung dalam fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Kota Baubau dengan fokus pada Dinas Sosial Kota Baubau sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan pada beberapa lokasi yang menjadi titik aktivitas pengemis anak, seperti kawasan lampu merah, pasar, dan area publik lainnya yang teridentifikasi sebagai lokasi aktivitas mengemis.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Ahmad & Wilkins, 2025). Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: 1) pejabat atau staf Dinas Sosial Kota Baubau yang memiliki tugas atau pengalaman dalam penanganan pengemis anak dan anak terlantar; 2) orang tua atau anggota keluarga dari anak yang melakukan aktivitas mengemis; dan 3) anak yang teridentifikasi pernah atau sedang terlibat dalam aktivitas mengemis di ruang publik Kota Baubau. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7

orang, yang terdiri atas 2 informan dari Dinas Sosial Kota Baubau, 2 orang tua anak, dan 3 anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab munculnya pengemis anak, bentuk intervensi yang dilakukan Dinas Sosial, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanganan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengemis anak pada beberapa titik lokasi di Kota Baubau. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi Dinas Sosial Kota Baubau, data pengemis anak dan anak terlantar, laporan kegiatan rehabilitasi sosial, regulasi terkait perlindungan anak, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan informasi dari informan mengenai fenomena pengemis anak serta intervensi yang dilakukan pemerintah daerah. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi sosial dan aktivitas pengemis anak di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Pada tahap reduksi data, seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, serta dikelompokkan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu tekanan ekonomi keluarga, orientasi ekonomi anak, bentuk intervensi Dinas Sosial, dan hambatan pelaksanaan intervensi. Pada tahap penyajian data, hasil pengelompokan data disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan interpretasi tematik agar hubungan antartemuan dapat terlihat secara sistematis. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan pola-pola temuan lapangan dan menghubungkannya dengan konsep intervensi sosial, perlindungan anak, dan implementasi kebijakan sosial.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Dinas Sosial Kota Baubau, orang tua atau keluarga anak, dan anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi yang relevan. Selain itu, peneliti menjaga konsistensi data melalui pencatatan lapangan, pengelompokan temuan berdasarkan tema, dan pemeriksaan ulang terhadap informasi penting yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian ini juga menjaga kerahasiaan identitas informan, terutama informan anak, serta memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali sebelum wawancara dan dokumentasi dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan disusun berdasarkan alur temuan penelitian, yaitu fenomena pengemis anak di Kota Baubau, bentuk intervensi Dinas Sosial, hambatan dalam

pelaksanaan intervensi, serta diskusi temuan dalam perspektif kebijakan sosial dan intervensi sosial. Dalam setiap bagian tersebut, temuan dianalisis melalui beberapa tema penting, terutama karakteristik aktivitas mengemis, tekanan ekonomi keluarga, orientasi ekonomi anak, dan pengulangan aktivitas mengemis setelah intervensi. Penyusunan ini digunakan untuk memperjelas hubungan antara kondisi keluarga, pengalaman anak memperoleh uang secara langsung, serta efektivitas intervensi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau.

3.1 Fenomena Pengemis Anak di Kota Baubau

Fenomena pengemis anak merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang masih ditemukan di berbagai daerah perkotaan, termasuk di Kota Baubau. Keberadaan anak-anak yang melakukan aktivitas meminta-minta di ruang publik menunjukkan adanya kerentanan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan anak, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Rejeki & Budiono, 2025). Dalam perspektif perlindungan anak, aktivitas mengemis yang dilakukan oleh anak berpotensi menghambat proses tumbuh kembang serta meningkatkan risiko eksploitasi dan marginalisasi sosial. Oleh karena itu, fenomena pengemis anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Baubau, jumlah pengemis anak dan anak terlantar yang terdata mencapai 52 orang yang tersebar pada beberapa kecamatan di wilayah Kota Baubau. Sebaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran Pengemis Anak/Anak Terlantar di Kota Baubau Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Pengemis Anak/ Anak Terlantar
1	Batupoaro	18
2	Betoambari	19
3	Bungi	0
4	Kokalukuna	0
5	Lea-Lea	5
6	Murhum	3
7	Sorawolio	2
8	Wolio	5
Jumlah		52

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah pengemis anak dan anak terlantar di Kota Baubau mencapai 52 orang yang tersebar pada delapan kecamatan. Kecamatan Betoambari merupakan wilayah dengan jumlah tertinggi, yaitu 19 orang, disusul Kecamatan Batupoaro sebanyak 18 orang. Sementara itu, Kecamatan Lea-Lea dan Wolio masing-masing memiliki 5 orang, Kecamatan Murhum sebanyak 3 orang, dan Kecamatan Sorawolio sebanyak 2 orang (Dinas Sosial Kota Baubau, 2023a). Adapun Kecamatan Bungi dan Kokalukuna tidak tercatat memiliki pengemis anak maupun anak terlantar pada saat pendataan dilakukan.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa fenomena pengemis anak cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang relatif lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang publik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi menjadi lokasi yang rentan terhadap munculnya aktivitas mengemis oleh anak.



Gambar 1. Aktivitas Pengemis Anak di Salah Satu Ruang Publik Kota Baubau

Gambar 1 menunjukkan aktivitas pengemis anak yang masih ditemukan pada ruang publik di Kota Baubau. Keberadaan anak-anak pada lokasi dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa ruang publik menjadi area yang sering dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan melalui aktivitas meminta-minta. Temuan ini memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa aktivitas mengemis telah menjadi salah satu strategi yang digunakan anak dan keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Temuan observasi tersebut diperkuat oleh keterangan informan anak yang menyatakan bahwa aktivitas mengemis biasanya dilakukan pada lokasi yang ramai karena peluang memperoleh uang lebih besar. Salah satu informan anak menyampaikan, “Biasanya saya mangkal di lampu merah atau di sekitar pasar itu, karena di situ yang ramai orang lewat” (AN-1). Kutipan ini menunjukkan bahwa anak memahami ruang publik sebagai tempat yang dianggap strategis untuk memperoleh pendapatan secara langsung. Karakteristik pengemis anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemis anak di Kota Baubau umumnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan melakukan aktivitas meminta-minta pada lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, aktivitas mengemis banyak ditemukan pada kawasan lampu merah, pasar tradisional, serta beberapa titik keramaian lainnya yang memungkinkan anak memperoleh uang dari pengguna jalan maupun masyarakat yang beraktivitas di lokasi tersebut.

Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas mengemis sebagian besar masih berada pada usia sekolah. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi jalanan menyebabkan sebagian anak menghabiskan waktu di ruang publik dibandingkan mengikuti aktivitas pendidikan maupun kegiatan sosial yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban kondisi sosial ekonomi keluarga, tetapi juga telah terlibat secara langsung dalam

aktivitas ekonomi informal yang berisiko terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa aktivitas mengemis dilakukan secara berulang dan telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian anak. Mereka memilih waktu-waktu tertentu yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh uang, terutama pada sore hingga malam hari ketika aktivitas masyarakat meningkat. Pola tersebut menunjukkan bahwa aktivitas mengemis telah berkembang menjadi strategi ekonomi yang dilakukan secara sadar oleh anak maupun keluarganya.

Tekanan ekonomi keluarga sebagai faktor pendorong

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak pengemis, diketahui bahwa faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis adalah tekanan ekonomi keluarga. Orang tua mengakui bahwa kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pendapatan keluarga yang tidak menentu, tingginya kebutuhan hidup, serta terbatasnya kesempatan kerja menjadi alasan utama yang mendorong anak ikut mencari penghasilan tambahan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu orang tua yang menyampaikan, "Kerjaan kami ini tidak menentu. Kadang mau makan saja susah, jadi anak terpaksa ikut cari uang. Siapa juga yang mau anak mengemis begini? Tapi ya mau bagaimana lagi, keadaan memang lagi sulit sekali" (OT-1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis tidak selalu dipahami keluarga sebagai pilihan yang diinginkan, tetapi sebagai strategi bertahan hidup ketika pendapatan rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan dasar.

Meskipun mengizinkan anak mengemis, para orang tua menyatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah pilihan yang mereka inginkan. Mereka menyadari bahwa aktivitas mengemis dapat berdampak buruk terhadap masa depan anak, tetapi kondisi ekonomi yang dihadapi membuat mereka sulit mencari alternatif lain. Dalam beberapa kasus, anak dipandang sebagai bagian dari strategi keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi faktor struktural yang memengaruhi munculnya fenomena pengemis anak. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar menyebabkan anak terdorong untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi jalanan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga. Dengan demikian, fenomena pengemis anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang menjadi lingkungan utama tumbuh kembang anak.

Orientasi ekonomi anak dalam aktivitas mengemis

Temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah munculnya orientasi ekonomi pada diri anak yang melakukan aktivitas mengemis. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak mengungkapkan bahwa mereka telah terbiasa memperoleh uang sendiri dari hasil meminta-minta di ruang publik. Uang yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga mereka tidak perlu lagi meminta kepada orang tua yang juga mengalami kesulitan ekonomi.

Salah satu informan anak mengungkapkan, “Kalau begini saya bisa punya uang sendiri. Jadi bisa buat beli jajan atau keperluan sendiri, tidak minta-minta terus sama orang tua” (AN-2). Kutipan ini menunjukkan bahwa pengalaman memperoleh uang secara langsung membentuk pemahaman anak bahwa mengemis merupakan cara yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dengan demikian, aktivitas mengemis tidak hanya berkaitan dengan dorongan keluarga, tetapi juga dengan cara anak memaknai manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Anak-anak memandang aktivitas mengemis sebagai cara yang mudah untuk memperoleh uang dalam waktu relatif singkat. Mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada orang tua. Dalam perspektif anak, aktivitas mengemis tidak hanya dipahami sebagai upaya membantu keluarga, tetapi juga sebagai sarana memperoleh kemandirian ekonomi sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas mengemis tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga, tetapi juga oleh terbentuknya orientasi ekonomi pada anak. Pengalaman memperoleh uang secara langsung telah membentuk persepsi bahwa aktivitas mengemis merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan penghasilan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aktivitas mengemis tetap dilakukan meskipun anak dan keluarganya telah memperoleh bantuan maupun pembinaan dari pemerintah.

Dengan demikian, fenomena pengemis anak di Kota Baubau merupakan hasil interaksi antara faktor struktural berupa tekanan ekonomi keluarga dan faktor individual berupa orientasi ekonomi anak. Tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor awal yang mendorong anak terlibat dalam aktivitas mengemis. Namun, setelah anak memperoleh uang secara langsung, pengalaman tersebut membentuk orientasi ekonomi baru yang membuat anak memandang mengemis sebagai cara yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Hubungan kedua faktor ini menjelaskan mengapa aktivitas mengemis tetap berlanjut meskipun anak dan keluarganya telah memperoleh bantuan maupun pembinaan dari pemerintah.

3.2 Intervensi Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis Anak

Penanganan pengemis anak merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. Dalam perspektif kebijakan sosial, intervensi terhadap kelompok rentan bertujuan untuk mengurangi risiko sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan individu maupun keluarga yang mengalami kerentanan. Oleh karena itu, penanganan pengemis anak tidak hanya dilakukan melalui tindakan penertiban, tetapi juga melalui berbagai program rehabilitasi sosial, edukasi, dan bantuan sosial yang bertujuan mencegah anak kembali melakukan aktivitas mengemis.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Baubau telah melaksanakan berbagai bentuk intervensi terhadap pengemis anak dan anak terlantar. Intervensi tersebut meliputi penjangkauan dan pendataan, rehabilitasi sosial, edukasi kepada keluarga, serta pemberian bantuan sosial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Berbagai bentuk intervensi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam

menjalankan fungsi perlindungan sosial terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Penjangkauan dan pendataan pengemis anak

Tahap awal intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau adalah penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang melakukan aktivitas mengemis di ruang publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin Bariun selaku Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar, Dinas Sosial secara rutin melakukan pengecekan terhadap anak-anak yang ditemukan pada sejumlah titik aktivitas mengemis di Kota Baubau. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi anak, latar belakang keluarga, serta kebutuhan yang diperlukan dalam proses penanganan.

Informan dari Dinas Sosial menyampaikan, “Kami turun lapangan cari anak-anak yang sering mangkal di titik-titik ramai itu. Setelah itu, kami data dulu semua, kami lihat bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan keluarga mereka, baru kami tentukan bantuan atau pembinaan apa yang cocok untuk mereka” (DS-1). Pernyataan ini menunjukkan bahwa penjangkauan dan pendataan menjadi tahap awal dalam menentukan bentuk layanan yang akan diberikan kepada anak dan keluarganya.

Penjangkauan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada di jalan memperoleh perhatian dan perlindungan dari pemerintah daerah. Selain itu, pendataan juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan bentuk layanan dan bantuan yang akan diberikan kepada anak maupun keluarganya. Melalui proses ini, Dinas Sosial dapat mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga serta faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas mengemis.

Dalam perspektif intervensi sosial, penjangkauan merupakan strategi awal yang penting karena memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang akurat mengenai kelompok sasaran. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan bantuan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.

Rehabilitasi sosial dan edukasi keluarga

Selain melakukan penjangkauan, Dinas Sosial Kota Baubau juga melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang teridentifikasi melakukan aktivitas mengemis. Berdasarkan hasil wawancara, rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi kepada anak mengenai pentingnya pendidikan, perlindungan diri, dan dampak negatif aktivitas mengemis terhadap masa depan mereka.

Intervensi tidak hanya difokuskan kepada anak, tetapi juga diarahkan kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak. Orang tua diberikan pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan anak serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila anak terus melakukan aktivitas mengemis. Melalui pendekatan tersebut, Dinas Sosial berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan.

Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa mereka telah menerima pembinaan dan arahan dari Dinas Sosial agar tidak lagi membiarkan anak melakukan aktivitas mengemis. Orang tua juga mengakui bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pendampingan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada anak sebagai

penerima manfaat, tetapi juga berupaya memperkuat kapasitas keluarga sebagai lingkungan utama tumbuh kembang anak.

Bantuan sosial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar

Selain rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kota Baubau juga memberikan bantuan sosial sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengemis anak dan anak terlantar. Data rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar menunjukkan bahwa seluruh pengemis anak dan anak terlantar yang terdata sebanyak 51 orang telah menerima bantuan berupa sandang (Dinas Sosial Kota Baubau, 2023b). Selain itu, terdapat layanan bimbingan sosial kepada keluarga sebagai bagian dari proses pendampingan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Tabel 2. Rehabilitasi dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengemis Anak/Anak Terlantar di Kota Baubau

No	Jenis Layanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima
1	Permakanan	0
2	Sandang	51
3	Alat Bantu	0
4	Perbekalan Kesehatan	0
5	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0
6	Bimbingan Sosial kepada Keluarga	1
7	Fasilitasi Dokumen Kependudukan	0
8	Akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0
9	Penelusuran Keluarga	0
10	Reunifikasi dan/atau Reintegrasi Sosial	0
11	Rujukan	0
Jumlah		52

Tabel 2 menunjukkan bahwa bentuk layanan yang paling dominan diberikan kepada pengemis anak dan anak terlantar adalah bantuan sandang yang diterima oleh seluruh penerima layanan. Data tersebut menunjukkan bahwa intervensi Dinas Sosial lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar sebagai langkah awal perlindungan sosial. Selain itu, terdapat layanan bimbingan sosial kepada keluarga yang bertujuan memperkuat fungsi pengasuhan dan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga.

Dalam perspektif kebijakan sosial, bantuan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dialami keluarga rentan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengurangi faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam aktivitas mengemis. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas mengemis yang dilakukan oleh sebagian anak.

Analisis intervensi Dinas Sosial dalam perspektif kebijakan sosial

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Baubau telah menjalankan fungsi perlindungan sosial melalui berbagai bentuk intervensi yang mencakup penjangkauan, rehabilitasi sosial, edukasi keluarga, dan bantuan sosial. Intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya melakukan tindakan represif berupa penertiban, tetapi juga berupaya memberikan layanan yang bersifat rehabilitatif dan preventif.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengemis masih berulang pada sebagian anak yang telah memperoleh rehabilitasi maupun bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, sebagian anak kembali melakukan aktivitas mengemis karena telah terbiasa memperoleh uang secara langsung dari aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar belum sepenuhnya mampu mengubah orientasi ekonomi yang telah terbentuk pada diri anak.

Dengan demikian, intervensi Dinas Sosial dalam penanganan pengemis anak dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan fungsi perlindungan sosial yang dimiliki pemerintah daerah. Namun, efektivitas intervensi masih menghadapi tantangan dalam mengubah perilaku dan pola pikir anak yang telah menganggap aktivitas mengemis sebagai sumber pendapatan yang mudah diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan pendidikan, pemberdayaan keluarga, serta pembinaan berkelanjutan agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara lebih optimal.

3.3 Hambatan Intervensi Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis Anak

Meskipun Dinas Sosial Kota Baubau telah melaksanakan berbagai bentuk intervensi melalui penjangkauan, rehabilitasi sosial, edukasi keluarga, dan pemberian bantuan sosial, fenomena pengemis anak masih terus ditemukan di sejumlah lokasi di Kota Baubau. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi sosial tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan perilaku anak, lingkungan sosial, serta keterbatasan dampak intervensi yang telah diberikan.

Tekanan ekonomi keluarga yang masih berlanjut

Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga masih menjadi faktor utama yang mendorong anak terlibat dalam aktivitas mengemis. Keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam situasi tersebut, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga meskipun mereka menyadari bahwa aktivitas tersebut tidak sesuai dengan hak-hak anak.

Orang tua mengakui bahwa mereka telah memperoleh bantuan sosial dan pembinaan dari Dinas Sosial. Namun demikian, bantuan yang diterima belum sepenuhnya mampu menghilangkan tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Kondisi ini menyebabkan sebagian keluarga masih bergantung pada tambahan penghasilan yang diperoleh anak melalui

aktivitas mengemis. Dengan demikian, kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga masih menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan pengemis anak di Kota Baubau.

Dalam perspektif kebijakan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengemis anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan perlindungan anak semata, tetapi juga memerlukan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan. Tanpa adanya perbaikan kondisi ekonomi keluarga, risiko keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis akan tetap tinggi meskipun berbagai bentuk bantuan telah diberikan.

Orientasi ekonomi yang terbentuk pada anak

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian anak yang melakukan aktivitas mengemis telah membentuk orientasi ekonomi yang berbeda dari asumsi umum mengenai anak jalanan. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak mengungkapkan bahwa mereka merasa mampu memperoleh uang sendiri melalui aktivitas meminta-minta. Uang yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga mereka tidak perlu lagi meminta kepada orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Pengalaman memperoleh pendapatan secara langsung menyebabkan anak memandang aktivitas mengemis sebagai sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi. Dalam pemahaman mereka, aktivitas tersebut merupakan cara yang relatif mudah untuk memperoleh uang dibandingkan harus bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas mengemis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi, tetapi juga telah membentuk pola pikir tertentu mengenai cara memperoleh pendapatan.

Temuan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan intervensi sosial. Meskipun anak telah mendapatkan edukasi dan rehabilitasi, pengalaman memperoleh uang secara langsung tetap menjadi faktor yang mendorong mereka untuk kembali melakukan aktivitas mengemis. Dengan kata lain, intervensi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berhadapan dengan masalah kemiskinan, tetapi juga dengan orientasi ekonomi yang telah berkembang pada diri anak.

Pengulangan aktivitas mengemis pasca intervensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, diketahui bahwa sebagian anak yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dan bantuan masih kembali melakukan aktivitas mengemis pada minggu atau bulan berikutnya. Fenomena ini menunjukkan adanya pengulangan perilaku yang menjadi tantangan dalam proses penanganan pengemis anak.

Salah satu informan dari Dinas Sosial menjelaskan, "Kadang ada juga anak yang sudah kami kasih pembinaan, sudah dibantu juga, tapi tidak lama kemudian kita lihat lagi dia di jalan. Susah juga, karena kondisi di rumah tidak berubah, lagipula mereka sudah terbiasa pegang uang gampang dari hasil di jalan itu" (DS-2). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa intervensi yang telah diberikan belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas mengemis apabila anak masih melihat aktivitas tersebut sebagai sumber pendapatan langsung dan keluarga masih berada dalam tekanan ekonomi.

Pengulangan aktivitas mengemis menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, anak kembali ke jalan karena masih melihat aktivitas mengemis sebagai sumber pendapatan yang dapat memberikan keuntungan secara langsung. Di sisi lain, keluarga juga masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan sehingga tidak mampu memberikan pengawasan dan dukungan yang optimal kepada anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku sosial memerlukan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan pemberian bantuan material. Bantuan sosial dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dalam jangka pendek, tetapi belum tentu mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan yang telah terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, keberhasilan intervensi sosial sangat bergantung pada keberlanjutan program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan kepada anak maupun keluarganya.

Keterbatasan efektivitas intervensi sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Baubau telah menjalankan berbagai bentuk intervensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, efektivitas intervensi masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan perilaku dan motivasi anak, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosial yang masih memungkinkan aktivitas mengemis berlangsung.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan anak kembali ke jalan. Intervensi yang ada masih lebih dominan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan jangka pendek. Sementara itu, aspek perubahan perilaku, penguatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga memerlukan perhatian yang lebih besar agar dampak intervensi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teori intervensi sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam mengubah perilaku penerima manfaat. Oleh karena itu, penanganan pengemis anak di Kota Baubau memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan pendidikan anak, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hambatan utama dalam penanganan pengemis anak di Kota Baubau dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor utama, yaitu tekanan ekonomi keluarga dan orientasi ekonomi anak. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang menyebabkan aktivitas mengemis tetap berulang meskipun berbagai bentuk intervensi telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Temuan inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini dalam menjelaskan kompleksitas fenomena pengemis anak di Kota Baubau.

3.4 Diskusi Temuan Penelitian dalam Perspektif Kebijakan Sosial dan Intervensi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengemis anak di Kota Baubau merupakan persoalan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga, tetapi juga oleh orientasi ekonomi yang berkembang pada diri anak setelah mereka memperoleh pendapatan secara langsung dari aktivitas mengemis. Temuan ini memperlihatkan bahwa fenomena pengemis anak tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor penyebab, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor struktural dan faktor individual yang saling memengaruhi.

Secara analitis, tekanan ekonomi keluarga dan orientasi ekonomi anak tidak berdiri sebagai dua faktor yang terpisah. Tekanan ekonomi keluarga menciptakan kondisi awal yang mendorong anak masuk ke ruang publik untuk mencari uang. Namun, pengalaman anak memperoleh pendapatan secara langsung kemudian membentuk orientasi ekonomi yang membuat aktivitas mengemis dipandang sebagai pilihan yang menguntungkan. Pada titik ini, anak tidak hanya menjadi korban kemiskinan keluarga, tetapi juga mulai membangun pemaknaan ekonomi terhadap aktivitas mengemis. Hubungan inilah yang menjelaskan mengapa intervensi sosial yang hanya berfokus pada bantuan material belum cukup untuk menghentikan pengulangan aktivitas mengemis.

Dalam perspektif fenomena sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku individu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang membentuknya. Tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor struktural yang mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi jalanan. Keterbatasan pendapatan keluarga, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta kerentanan sosial yang dialami rumah tangga menciptakan situasi yang memungkinkan anak berpartisipasi dalam aktivitas mencari penghasilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Schelbauer et al. (2022) yang menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan merupakan konsekuensi dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rentan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Jasni et al. (2022) yang menempatkan kemiskinan sebagai faktor dominan dalam munculnya fenomena anak jalanan dan pengemis anak.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan dimensi lain yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak yang melakukan aktivitas mengemis mengaku telah terbiasa memperoleh uang sendiri dan menganggap aktivitas tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung kepada orang tua. Temuan ini menunjukkan adanya orientasi ekonomi yang terbentuk melalui pengalaman memperoleh pendapatan secara langsung. Dengan kata lain, aktivitas mengemis tidak lagi dipahami semata-mata sebagai akibat kemiskinan, tetapi juga telah membentuk pola pikir tertentu mengenai cara memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan pribadi.

Temuan tersebut menjadi kontribusi penting penelitian ini karena memperlihatkan bahwa anak tidak hanya berada pada posisi sebagai korban kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai aktor sosial yang membangun pemaknaan terhadap aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai fenomena pengemis anak yang selama ini lebih banyak dijelaskan melalui pendekatan kemiskinan dan kerentanan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru

bahwa perilaku mengemis pada anak dapat terus berlangsung karena adanya persepsi mengenai manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Dari perspektif intervensi sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Baubau telah menjalankan berbagai bentuk intervensi yang meliputi penjangkauan, rehabilitasi sosial, edukasi keluarga, serta pemberian bantuan sosial. Intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Temuan ini sejalan dengan pandangan Peacock (2022) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi berisiko.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai bentuk intervensi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas mengemis yang dilakukan oleh anak. Sebagian anak masih kembali melakukan aktivitas mengemis meskipun telah memperoleh bantuan sosial, rehabilitasi, dan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi sosial tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program dan bantuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan program dalam mengubah perilaku dan pola pikir penerima manfaat.

Temuan tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edwards III (1980), yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada desain program, tetapi juga pada kondisi lingkungan sosial yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan ekonomi keluarga dan orientasi ekonomi anak menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas intervensi sosial. Oleh karena itu, meskipun program telah dijalankan dengan baik, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena masih terdapat faktor-faktor sosial yang belum terselesaikan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa penanganan pengemis anak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar pemberian bantuan sosial. Intervensi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar memang penting untuk mengurangi tekanan ekonomi keluarga, tetapi belum cukup untuk mengubah perilaku anak yang telah terbentuk melalui pengalaman memperoleh uang secara langsung. Oleh karena itu, strategi penanganan pengemis anak perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan akses pendidikan, pendampingan psikososial, serta pembinaan berkelanjutan yang mampu membangun kesadaran anak mengenai pentingnya pengembangan diri di luar aktivitas ekonomi jalanan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fenomena pengemis anak di Kota Baubau merupakan hasil interaksi antara tekanan ekonomi keluarga dan orientasi ekonomi anak. Intervensi sosial yang dilakukan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan fungsi perlindungan sosial yang dimiliki, tetapi efektivitasnya masih menghadapi hambatan yang berasal dari faktor ekonomi dan perilaku. Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi teoritis penelitian dalam memperluas kajian mengenai hubungan antara kemiskinan, perilaku ekonomi anak, dan efektivitas intervensi sosial dalam penanganan pengemis anak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pengemis anak di Kota Baubau masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Baubau, terdapat 52 pengemis anak dan anak terlantar yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Betoambari dan Batupoaro. Fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi keluarga, tetapi juga oleh orientasi ekonomi yang berkembang pada diri anak akibat pengalaman memperoleh pendapatan secara langsung melalui aktivitas mengemis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis. Orang tua mengakui bahwa keterbatasan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan mereka mengizinkan anak membantu memperoleh penghasilan tambahan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan aktivitas mengemis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Anak-anak yang telah terbiasa memperoleh uang dari aktivitas mengemis mulai membangun orientasi ekonomi yang membuat mereka memandang aktivitas tersebut sebagai cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Dalam upaya penanganan pengemis anak, Dinas Sosial Kota Baubau telah melaksanakan berbagai bentuk intervensi yang meliputi penjangkauan dan pendataan, rehabilitasi sosial, edukasi kepada keluarga, serta pemberian bantuan sosial. Data penelitian menunjukkan bahwa seluruh pengemis anak dan anak terlantar yang terdata telah menerima bantuan sandang, sementara keluarga juga memperoleh pembinaan sosial. Intervensi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi perlindungan sosial terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Meskipun demikian, efektivitas intervensi masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagian anak yang telah memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial masih kembali melakukan aktivitas mengemis. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial dan rehabilitasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku serta orientasi ekonomi yang telah terbentuk pada diri anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena pengemis anak di Kota Baubau merupakan hasil interaksi antara tekanan ekonomi keluarga dan orientasi ekonomi anak, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Baubau perlu memperkuat program rehabilitasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada perubahan perilaku dan penguatan kapasitas anak. Pendekatan rehabilitasi perlu dipadukan dengan pendampingan psikososial, pembinaan berkelanjutan, serta penguatan akses pendidikan agar anak memiliki alternatif yang lebih positif dibandingkan aktivitas mengemis.

Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang lebih terarah bagi keluarga pengemis anak dan anak terlantar. Penguatan

ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, maupun program pemberdayaan lainnya dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan keluarga terhadap pendapatan yang diperoleh anak melalui aktivitas mengemis.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan pengemis anak. Kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung perlindungan anak dan mencegah terjadinya pengulangan aktivitas mengemis.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa kebijakan perlindungan anak dalam penanganan pengemis anak tidak cukup hanya diarahkan pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga perlu memperhatikan faktor keluarga dan perubahan perilaku anak. Temuan mengenai orientasi ekonomi anak menunjukkan bahwa pengalaman memperoleh uang secara langsung dapat membentuk cara pandang anak terhadap aktivitas mengemis sebagai sumber pendapatan yang mudah diperoleh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap kondisi sosial keluarga, perilaku anak, dan kebutuhan intervensi yang berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi praktis, Dinas Sosial Kota Baubau perlu mengembangkan model intervensi berbasis keluarga dan perubahan perilaku. Model ini dapat dilakukan melalui pendampingan keluarga secara berkala, penguatan kapasitas pengasuhan orang tua, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, konseling atau pembinaan psikososial bagi anak, serta pemantauan berkelanjutan terhadap anak yang telah menerima rehabilitasi. Pendekatan tersebut penting agar intervensi tidak hanya menghentikan aktivitas mengemis dalam jangka pendek, tetapi juga mengubah pola pikir anak dan mengurangi ketergantungan keluarga terhadap pendapatan anak dari aktivitas mengemis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi sosial dalam jangka panjang, terutama dengan menilai perubahan perilaku anak, keberlanjutan pendampingan keluarga, dan tingkat pengulangan aktivitas mengemis setelah program intervensi dilaksanakan.

5. Daftar Pustaka

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 59(2), 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Dinas Sosial Kota Baubau. (2023a). *Data Pengemis Anak dan Anak Terlantar Kota Baubau*.
- Dinas Sosial Kota Baubau. (2023b). *Rehabilitasi dan Bantuan Sosial untuk Pengemis Anak dan Anak Terlantar Kota Baubau*.

- Dinillah, P., Effendi, N., & Delfi, M. (2025). Rethinking urban poverty: The educational and psychological dimensions of begging. *EDUCATIONE*, 379–388.
- Drydakis, N. (2023). Forced labor and health-related outcomes. The case of beggar children. *Child Abuse & Neglect*, 146, 106490. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106490>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.
- Fantahun, T., & Taa, B. (2022). Children of the street: The cause and consequence of their social exclusion in Gondar city, North West Ethiopia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2068268. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2068268>
- Hoang, A., Sanders, M. R., Turner, K. M. T., Morawska, A., Cobham, V., Chainey, C., & Simmons, E. (2024). Connecting families, schools, and communities: A systems-contextual approach to sustainable futures for children. *Sustainable Development*, 32(5), 4505–4517. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sd.2911>
- Husnan, M. (2026). The Social and Economic Factors Influencing Child Street Begging: Evidence from Probolinggo, Indonesia. *SocioSphere: Journal of Interdisciplinary Studies*, 1(1), 55–64.
- Jasni, M. A., Hassan, N., Ibrahim, F., Kamaluddin, M. R., & Che Mohd Nasir, N. (2022). The Interdependence Between Poverty and Homelessness in Southeast Asia: The Case of Malaysia, Indonesia, Thailand, and Singapore. *International Journal of Law, Government and Communication*, 7(29), 205–222. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.729015>
- Kusumawati, D., & Luluardi, Y. D. (2023). Legal Protection for the Rights of Children Exploited as Beggars. *Asian Journal of Law and Humanity*, 3(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. 2659(1), 140009.
- Musofiana, I., & Osman, A. K. (2025). Beyond the Streets: Rethinking Legal Protection for Exploited Street Children in Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(3), 471–490.
- Nnama-Okechukwu, C. U., Ebimgbo, S. O., Agha, A. A., & Onalu, C. E. (2023). Vulnerable children aiding visually challenged beggars in Nigeria: Need for social work intervention. *Children & Society*, 37(2), 616–633.
- Nurwati, N., Fedryansyah, M., & Achmad, W. (2022). Social policy in the protection of street children in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(3).
- Ohab, M. A., & Shovo, T.-E.-A. (2026). Homeless but not Hopeless: Unveiling the Harsh Realities of Street Children and Need-Based Interventions for Long-Term Protection. *Child Indicators Research*, 19(1), 493–536.

- Peacock, T. N. (2022). Advancing early childhood development: The role of local government. *South African Journal on Human Rights*, 38(3–4), 285–308. <https://doi.org/10.1080/02587203.2023.2221451>
- Rejeki, S., & Budiono, A. (2025). Criminal Policy To Combat Child Exploitation As Beggars And Vagrants Through A Community-Based Approach In Bima City. *Architecture Image Studies*, 6(3), 1785–1796.
- Saghir, F. (2025). *Child Begging in Lahore: A Governance and Policy Perspective*. University of Management and Technology.
- Schelbauer, L., Queiroz Neto, E., & Oliveira, G. B. de. (2022). O trabalho infantil como um problema social: Percepções sobre o tema. *Revista Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, 1(8), 330–345. <https://doi.org/10.51896/CCS/YYQK2280>
- Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., Utomo, S. S., & Pudjiastuti, D. (2025). Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(1), 1–16.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (2009).
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).